

Hari Internasional untuk Pemberantasan Kemiskinan (17 Oktober)

## Apakah Indonesia Memerlukan Metode Penghitungan Garis Kemiskinan Baru?

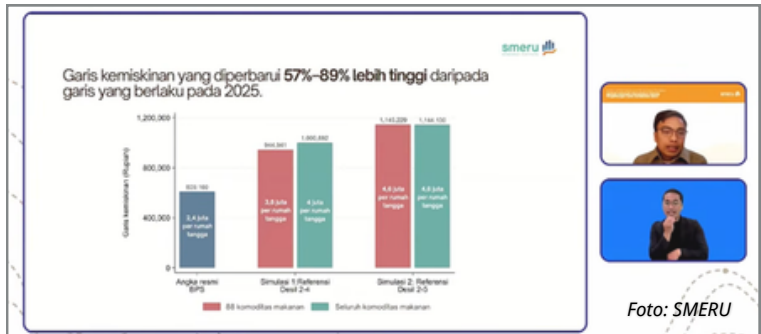


Foto: SMERU

Dalam hampir tiga dekade terakhir, kesejahteraan masyarakat Indonesia banyak berubah. Namun, metode penghitungan garis kemiskinan nasional masih mengacu ke standar yang ditetapkan pada 1998. Padahal, garis kemiskinan merupakan salah satu dasar penting dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk membahas pembaruan metode penghitungan garis tersebut, SMERU menggelar seminar bertajuk “Apakah Indonesia Memerlukan Metode Penghitungan Garis Kemiskinan Baru?” pada 15 Oktober 2026.

Seminar ini menghadirkan pembicara dari berbagai pemangku kepentingan untuk memperkaya diskusi. Peneliti Senior SMERU, Dr. Ridho Al Izzati, menyampaikan paparan yang mengusulkan pergeseran acuan dari batas minimum untuk bertahan hidup menuju standar hidup layak minimum. Deputy Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Dr. M. Nashrul Wajdi, SST., M.Si., memaparkan simulasi pembaruan metode penghitungan garis kemiskinan yang tengah dikaji BPS. Sementara itu, Peneliti Utama SMERU, Dr. Sudarno Sumarto, menekankan pentingnya kesepakatan para pemangku kepentingan mengenai definisi kemiskinan dan garis kemiskinan. Dari sisi pengambil kebijakan, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, S.T., M.W.R.M., menjelaskan implikasi pembaruan ini bagi perencanaan dan penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan. [Klik gambar](#) untuk menonton rekaman seminar dan mengunduh paparan Dr. Ridho.

### Publikasi Terbaru



### Memperkuat Perlindungan Sosial Adaptif untuk Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Perdesaan terhadap Perubahan Iklim

Perubahan iklim kian mengancam penghidupan petani lahan kering, nelayan tangkap, dan pembudidaya rumput laut. Namun, sistem perlindungan sosial belum sepenuhnya mampu merespons kerentanan iklim yang terus berubah. Berdasarkan studi di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Mamuju, Sulawesi Barat, SMERU mengidentifikasi tiga celah dalam perlindungan sosial adaptif. [Klik gambar](#) untuk mengetahui rekomendasi selengkapnya.

### Tantangan Pembangunan Indonesia Berikutnya: Mengubah Pertumbuhan Ekonomi Menjadi Lapangan Kerja Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang stabil belum tentu menjamin kesejahteraan yang merata. Di tengah lambatnya kenaikan upah, menyusutnya kelas menengah, dan ketimpangan struktural, Indonesia menghadapi tantangan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja produktif dan berkualitas. Blog terbaru SMERU membahas mengapa keberhasilan pembangunan perlu diukur bukan hanya dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat meningkatkan taraf hidup dan membangun masa depan yang lebih sejahtera. [Klik gambar](#) untuk membaca blog selengkapnya.



## The Implications of Poverty Dynamics for Targeting the Poor: Simulations Using Indonesian Data

Studi ini mengkaji bagaimana dinamika kemiskinan memengaruhi ketepatan sasaran program bantuan sosial di Indonesia. Temuannya menunjukkan bahwa perubahan kondisi ekonomi rumah tangga dapat menyebabkan kesalahan penargetan: rumah tangga yang membutuhkan berisiko tidak menerima bantuan, sementara rumah tangga yang tidak tergolong miskin saat pendataan justru dapat menerimanya. Meski diterbitkan pada 2014, temuan ini masih relevan karena menegaskan pentingnya memperbarui data penerima bantuan secara berkala agar program perlindungan sosial lebih tepat sasaran. [Klik gambar](#) untuk membaca laporannya (hanya tersedia dalam bahasa Inggris).



Foto: radarpati.jawapos.com

## Kegiatan



Foto: CIPS

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) bersama Konsorsium Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia (KMPPI) menggelar diskusi di Jakarta

pada 13 Oktober 2026 untuk membahas tata kelola penyetaraan dan transisi peserta didik menuju sistem pendidikan yang terbuka dan berkelanjutan. Peneliti Senior SMERU, Asri Yusrina, menjadi pemantik diskusi yang turut dihadiri Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dr. Agung Widiantoro. Hasil diskusi dirumuskan menjadi rekomendasi bersama untuk draf RUU Sisdiknas dan diadvokasikan KMPPI kepada para pemangku kepentingan terkait.



Direktur Eksekutif SMERU, Widjanti Isdijoso, memberikan sambutan pada sosialisasi hasil perhitungan Indeks Pembangunan Ekonomi

Inklusif (IPEI) 2024 dan 2025 yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas secara daring pada 21 Oktober 2026. Ia menguraikan perjalanan pengembangan konsep pada 2017, peluncuran resmi pada 2018, hingga pemanfaatannya sebagai alat bantu evaluasi kinerja pembangunan daerah pada 2023. Pembaruan data IPEI terus dilakukan sejak 2022 untuk mendukung pemantauan pembangunan ekonomi yang inklusif.

## Hari Perawatan dan Dukungan Internasional (29 Oktober)



Film dapat membentuk cara kita memandang profesi pekerja rumah tangga (PRT). Di layar lebar, mereka hadir dalam beragam kisah yang mengundang tawa maupun simpati. Namun, sejauh mana penggambaran tersebut mencerminkan realitas kehidupan PRT, termasuk kondisi kerja, pemenuhan hak, dan perlindungan mereka? [Klik gambar](#) untuk melihat representasi PRT dalam film dengan temuan studi SMERU.

## SMERU Learning Centre

Batch 2 - 2026

## Pelatihan Penulisan Artikel untuk Jurnal Ilmiah



Sabtu,  
21 November 2026



Online

pendaftaran:



slclab.id



Sertifikat Digital - 8 JP

Batas registrasi:  
Rabu, 18 November 2026



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-Nonkomersial 4.0 Internasional. Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya.

Kunjungi kami:



© 2025 The SMERU Research Institute  
Hak cipta dilindungi undang-undang.